BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Perkembangan Sektor Perikanan di Indonesia

Sejak UNCLOS 1982 ditetapkan dan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 5/1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dari aspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara. Peran perikanan sebagai salah satu industri di pesisir nampak masih sangat kecil (10% dari PDB Pertanian) dan berdasarkan data yang dilaporkan sektor ini masih berada di bawah sektor lainnya dalam kurun waktu lebih dari satu abad terakhir. Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136/1999, atau kini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) (http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=160:menelusuri-pola-pertumbuhan-industri-perikanan-laut-indonesia-beberapa-catatan).

Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari

sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan.

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*peryphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional (http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf).

3.1.1 Potensi Sumber Daya Kelautan

Beberapa potensi yang Indonesia miliki adalah sebagai berikut:

1. Potensi Fisik

   Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari perairan nusantara seluas 2.8 juta km², laut teritorial seluas 0.3 juta km². Perairan nasional seluas 3,1 juta km², luas daratan sekitar 1,9, luas wilayah nasional 5,0 juta km², luas *Exlusive Economic Zone* (ZEE) sekitar 3,0 juta km², panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.

2. Potensi Pembangunan

   Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi pembangunan adalah sebagai berikut:

   - Sumber daya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (tangkap, budidaya dan pascapanen), hutan mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulau – pulau kecil
   - Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti; minyak bumi dan gas, bahan tambang dan mineral lainnya serta harta karun
   - Energi kelautan seperti; pasang-surut, gelombang, angin
   - Jasa – jasa lingkungan seperti; pariwasata, perhubungan, dan kepelabuhan serta penampung atau penetralisir limbah.

3. Potensi Sumber Daya Pulih

   Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi perikanan meliputi: perikanan laut (tuna, udang, demersal, pelagis

kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, perairan umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, budidaya tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, budidaya air tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan potensi bioteknologi kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000, secara total potensi sumber daya perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbaru serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

4. Potensi Sumber Daya Tidak Pulih

   Pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5

miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 triliun kaki kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 triliun kaki kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.

5. Potensi Geopolitis

   Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negaranegara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.

6. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi SDM adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti: perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara (http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto .pdf).

3.1.2 Mitra Dagang Perikanan Indonesia

Di bidang agribisnis dan agroindustri, sektor perikanan termasuk salah satu penyumbang devisa negara nonmigas cukup besar bersama sektor kehutanan dan perkebunan. Yang kita ketahui juga Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana perairan Indonesia memiliki 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia meliputi 12,0% mamalia, 23, 8% amphibia, 31,8% reptilia, 44,7% ikan, 40,0% molluska dan 8,6% rumput laut. Selain Jepang sebagai mitra dagang Indonesia, beberapa negara lain juga menjadi mitra dagang Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Kawasan Timur Tengah, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Dengan persentase pada tahun 2008, ekspor produk perikanan Indonesia

mendapatkan keuntungan US$2,6 miliar, berarti naik 13 % dibanding ekspor tahun sebelumnya (2007) sebesar US$2,3 miliar. Kenaikan ini, karena ada nota kesepahaman antara Indonesia dan negara tujuan ekspor, terutama mengenai ketentuan kualitas produksi dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Indonesia mempertahankan tiga pasar utama ekspor hasil perikanan dengan menjaga harmonisasi dengan otoritas di negara itu, di samping memperluas pasar ke China, Korea Selatan, Taiwan, dan Timur Tengah. Sampai saat ini udang merupakan komoditas andalan ekspor, penghasil devisa selain ikan tuna. Pada 2009, devisa yang berhasil didapat dari udang mencapai US$1,576 miliar atau 63,3% dari total nilai ekspor perikanan yang sebesar US$2,466 miliar. Pasar utama ekspor perikanan Indonesia ditujukan ke Jepang, Uni Eropa dan AS dengan pangsa masing-masing sebesar 26%, 14% dan 34%. Untuk negara-negara kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan, Thailand, Singapura, Hongkong dan Taiwan pangsa pasarnya sekitar 20%. Di tahun 2008 (total setahun) nilai ekspor ke kawasan Timur Tengah tercatat 46 juta dolar AS, naik 39,6% menjadi 63 juta dolar AS tahun 2009. Secara nasional total nilai ekspor produk perikanan periode Januari 2010 - Maret 2010 mencapai 621,8 juta dolar AS, meningkat dari 577,2 juta dolar AS tahun 2009. Sedangkan nilai ekspor ke kawasan Timur Tengah pada Januari 2010-Maret 2010 mencapai 22,3 juta lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu di level 16,4 juta dolar AS (http://www.kkp.go.id/index.php/export/post/c/2884/print/).

3.1.3 Hasil Perikanan Di Berbagai Wilayah Indonesia Tahun 2006 – 2010

Sebagai negara agraris, sudah sepantasnya, negara ini menghasilkan produk perikanan yang layak. Berdasarkan data Kementerian Perikanan dan Kelautan, selama 2010, volume produksi perikanan nasional melebih target yang ditetapkan pemerintah. Target pemerintah, pada 2010, sebanyak 10,76 juta ton. Realisasinya, mencapai 10,83 juta ton. Selama periode 2006-2010 perikanan mengalami pertumbuhan 19,56 persen (http://jabar.Tribun news.com/read /artikel/38761/Tahun-Lalu-Produksi-Perikanan-Nasional-Capai-10 8-Juta-Ton).

Beberapa gambaran umum tentang hasil perikanan di berbagai wilayah Indonesia diantaranya, adalah:

1. Sulawesi Tengah

   Ikan Tuna merupakan salah satu komoditi ekspor yang dapat menghasilkan devisa bagi Indonesia. Ikan Tuna Indonesia merupakan komoditi bernilai strategis, di pasarkan untuk mengisi permintaan pasar dunia dalam bentuk utuh, loin, dan Tuna siap saji dalam kemasan kaleng. Untuk memenuhi permintaan pasar, ikan Tuna harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sebagian ekspor ikan Tuna Indonesia berasal dari Sulawesi Tengah namun seberapa besar kontribusi Sulawesi Tengah belum tercatat sebagai ekspor Tuna Sulawesi Tengah. Tidak tercatatnya ekspor Tuna Sulawesi Tengah disebabkan hasil produksi penangkapan Tuna Sulawesi Tengah baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk Tuna loin, di kirim ke Surabaya, Jakarta, Bitung dan Gorontalo. Tuna Sulawesi Tengah merupakan hasil penangkapan

nelayan di perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang didaratkan di PPI Donggala dan Ogotua dengan hasil penangkapan yang dijual ke perusahaan pengumpul PT. Era Mandiri Pratama di Kayu Malue Palu Utara dapat mencapai 4 ton/hari atau 104 ton/bulan pada musim ikan (April – Oktober), tujuan pemasaran Loin Tuna beku ke Jakarta. Untuk perairan Teluk Tolo, hasil penangkapan Tuna nelayan Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan Loin bekunya di pasarkan ke Surabaya dan Jakarta. Hasil penangkapan di Buol di beli oleh pedagang pengumpul dari Bitung dan Gorontalo. Hasil penangkapan di Toli-Toli ke Gorontalo dan sebagian di kirim ke Jakarta, sedangkan yang dari Morowali di pasarkan ke Kendari. Hal ini menunjukan bahwa produksi Tuna Sulawesi Tengah tidak ada yang diekspor langsung. Total produksi Tuna Sulawesi Tengah pada 2009 sebesar 25.211,96 ton terdiri dari Albakora 710,43 ton, Madidihang 2.234,45 ton dan Cakalang 20.008,48 ton (http://dkp.sulteng.go.id/ index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=75).

2. Bali

Nilai ekspor hasil perikanan dan kelautan Bali sebesar 10,35 juta dolar AS selama Januari 2011, meningkat 8,66 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 9,51 juta dolar AS. Bahkan selama lima tahun terakhir, 2006-2010 peningkatan ekspor itu rata-rata 23,52 persen dan mempunyai andil sebesar 28,80 persen terhadap total ekspor Bali secara keseluruhan yang mencapai 519,91

juta dolar AS selama 2010, meningkat 3,48 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 502,54 juta dolar AS. Ekspor hasil perikanan dan kelautan tahun 2006 tercatat 52,46 juta dolar AS meningkat 36,97 persen menjadi 71,33 juta dolar AS tahun 2007, bertambah lagi 33,84 persen menjadi 95,17 juta dolar AS pada tahun 2008. Bali mengirim 12 jenis hasil perikanan dan kelautan ke pasaran ekspor antara lain Jepang, Taiwan, Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Inggris dan Jerman, di samping memenuhi konsumsi masyarakat setempat, termasuk wisatawan dalam menikmati liburan di Pulau Dewata, Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi, tingkat kesejahteraan nelayan dan perolehan devisa yang semakin besar (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/18/211 60/129/101/Ekspor-Perikanan-Bali-Naik-866-Persen).

3. Sumatera Barat

Realisasi volume dan nilai ekspor produk perikanan Sumatera Barat (Sumbar) dalam periode I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2006-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meski volume dan nilainya berfluktuasi, namun pertumbuhan ekspor perikanan Sumbar meningkat pesat, dimana volume ekspor tumbuh hingga 639,94 persen dan nilai ekspor tumbuh hingga 887,19 persen. Pada 2008, volume ekspor perikanan Sumbar kembali turun menjadi 391 ton, namun nilai ekspor justru meningkat tajam menjadi 4,292 juta dolar yang dipengaruhi naiknya harga tingkat dunia dan

membaiknya kualitas produk yang diekspor. Untuk 2009, volume ekspor produk perikanan Sumbar meningkat tajam menjadi 723,3 ton dan nilai ekspor kembali menonjak tajam menjadi 10,288 juta dolar, dimana harga tingkat dunia semakin tinggi (http://www.berita daerah.com/ berita/sumatra/36969).

4. Bitung (Sulawesi Utara)

   Kontribusi Produk domestik bruto (PDB) sub sektor perikanan pada tahun 2006 hingga 2010 terus meningkat, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,76% pertahun. Pada tahun 2009, PDB sub sektor perikanan sebesar Rp 177,77 triliun, atau sekitar 2,77% PDB nasional. Sementara hingga triwulan ketiga tahun 2010, sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp 148,16 triliun atau 3,14% dari PDB nasional. Volume dan nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2006-2010 juga mengalami peningkatan sebesar 5,37% pertahun, sejalan dengan peningkatan nilai ekspor dengan rata-rata pertumbuhan 7,87% per tahun. Pada tahun 2010, nilai ekspor perikanan tercatat US$ 2,9 miliar meningkat 17,4% dibanding tahun 2009 yang berjumlah US$ 2,47. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mengembangkan kawasan minapolitan atau kota ikan, yang merupakan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir berbasis wilayah. Untuk menyukseskan program minapolitan, pemerintah mengalokasikan anggaran Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) tahun 2010 sebesar 3,1 trilliun naik menjadi Rp 4,7 triliun pada tahun 2011 (http://setkab.go.id/index. php/pengumuman/ 2010/10/29/index.php?pg=detailartikel&p=1513).

3.2 Gambaran Hubungan Kerjasama Indonesia – Jepang

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang Bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007) (http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html).

Hubungan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang selama ini di awali dengan pemberian bantuan yaitu ODA (Bantuan Pembangunan Tingkat Pemerintah) (http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html).

Dalam mendorong liberalisasi ekonomi, Jepang lebih banyak melakukan kerjasama melalui berbagai FTA baik bilateral maupun regional, dibanding aktif dalam forul multilateral. Salah satu bentuk kerjasama yang saat ini banyak dilakukan Jepang adalah kerjasamaekonomi yang dikenal *Economic Partnership Agreement* (EPA). Secara ringkas EPA merupakan strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri untuk mendorong daya saing ekonomi. Tujuan utama Jepang melakukan EPA dengan banyak negara adalah untuk menjamin pasokan energi dalam jangka panjang. Bagi Jepang keterjaminan pasokan energi dan bahan baku akan menjadi kunci untuk mengembangkan dan menjaga daya saing industrinya. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat maju di sektor

industri manufaktur karena keunggulan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun tanpa jaminan energi dan bahan baku, daya saing Jepang sebagai negara industri akan luntur dan digantikan oleh negara – negara industri baru yang memiliki bahan baku dan menguasai energi dan telah berhasil menyiapkan sumber daya manusia dan teknologi (Khor, 2010:11).

Kerjasama kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang yang dilakukan dalam bingkai EPA yakni *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)disepakati pada tanggal 20 agustus 2007 dan berlaku efektif pada 1 juli 2008. Berbeda dengan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA ini merupakan lompatan kerjasama ekonomi dengan cakupan yang sangat luas. Tidak sekedar melakukan percepatan perdagangan bebas lewat penurunan tarif bea masuk sebagaimana dilakukan dalam *World Trade Organization* (WTO). Tetapi, bentuk kerjasama EPA dilakukan untuk mendorong dan menjamin kegiatan investasi, kebebasan lalu lintas uang, barang dan tenaga kerja, jaminan penyediaan barang bagi pemerintah, bahkan kerjasama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi (Khor, 2010:14).

3.2.1 *Official Development Assistance* (ODA)

Bantuan ODA Jepang di Indonesia dimulai dari tahun 1954, dalam bentuk penerimaan *trainee* untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang yang telah memberikan kontribusi besar melalui di bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Misalnya, pada saat krisis ekonomi

melanda Asia sejak Agustus 1997, Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain. Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 juta US Dollar (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm).

Selama ini, secara kumulatif, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar US Dollar (total kumulatif sampai tahun 2006), oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Dengan latar belakang inilah, Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik.

ODA Jepang bertujuan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas internasional, dan dengan demikian membantu menjamin keamanan dan kemakmuran Jepang sendiri. Jepang sebagai salah satu negara yang terkemuka di dunia, bertekad untuk menggunakan sebaik-baiknya ODA dalam prakarsa mengatasi isu-isu pembangunan.

Adapun kebijakan – kebijakan dasar ODA adalah:

1. Mendukung Usaha Swadaya Negara-negara Yang Sedang Berkembang
   Falsafah yang paling penting dari ODA Jepang adalah mendukung usaha-usaha swadaya yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang berdasarkan tata-pemerintahan yang baik, yaitu dengan

memberikan kerjasama bagi pengembangan sumberdaya mereka, pembangunan institusi termasuk pengembangan sistem hukum, dan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial, yang merupakan basis bagi pembangunan negara-negara tersebut.

2. Perspektif Keamanan Manusia

   Jepang akan mementingkan perspektif Keamanan manusia dalam kegiatan-kegiatan ODA. Jepang akan melakukan usaha-usaha untuk melindungi individu-individu dan komunitas-komunitas dari ancaman seperti konflik, kejahatan, kemiskinan dan penyakit-penyakit menular, dan memberikan bantuan bagi pemberdayaan rakyat agar mereka dapat mengatasi berbagai ancaman tersebut.

3. Jaminan Keadilan Dalam Pelaksanaan ODA,

   Jepang akan mempertimbangkan kondisi kaum yang rentan secara sosial, jurang antara si kaya dan si miskin serta jurang yang terdapat antar berbagai kawasan di negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, akan diberikan perhatian penuh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek ODA. Jepang akan melakukan usaha-usaha selanjutnya untuk memperbaiki status kaum wanita.

4. Pemanfaatan Pengalaman Dan Keahlian Jepang akan memanfaatkan pengalamannya sendiri, berbagai teknologi maju dan sumberdaya manusia dalam ODA-nya sementara mempertimbangkan berbagai

kebijakan dan kebutuhan akan bantuan di negara-negara yang sedang berkembang.

5. Kemitraan dan Kolaborasi Dengan Masyarakat Internasional Jepang akan memperluas kolaborasi dengan para pelaku lainnya yang menangani bantuan pembangunan, seperti organisasi-organisasi internasional, negara-negara donor lainnya, LSM dan sektor swasta (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm).

3.2.2 Sistem Bantuan ODA Jepang di Indonesia

Terhadap negara-negara berkembang, selama ini Jepang telah memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti memberikan bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonominya. Demikian pula halnya dukungan untuk membantu para korban bencana, dan lain-lain. Diantara itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaku utama disebut, "Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistance*)" (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm).

1. Pinjaman Yen

   Pinjaman Yen adalah, pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC).

2. Bantuan Dana Hibah

   Bantuan dana hibah adalah, bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali.

3. Kerjasama Teknik

   Kerjasama teknik adalah, kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan "upaya pembangunan manusia" yang akan memegang peranan didalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik serta pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, maka Jepang menerapkan cara dengan mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey, atau kesemuanya ini tercakup dalam bentuk "Proyek Kerjasama Teknik" dan lain-lain.

Kerjasama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama, "*Japan International Cooperation Agency* (JICA)" (http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm).

Dengan strategi ODA Jepang akan mendapatkan manfaat langsung yakni menekan biaya investasi perusahaan – perusahaan Jepang di negara penerima ODA. Alasannya, dana ODA telah mengarahkan pembangunan fasilitas infrastruktur untuk mendukung bisnis perusahaan – perusahaan Jepang yang akan masuk ke negara penerima ODA. Namun di era 2000-an, strategi perdagangan dan

investasi internasional Jepang telah bergeser dan lebih menekankan pada strategi kerjasama FTA atau EPA bukan lagi mengandalkan ODA (Khor, 2010:13).

3.2.3 *Economic Partnership Agreement* (EPA)

EPA merupakan strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri untuk mendorong daya saing ekonomi. Tujuan utama Jepang melakukan EPA dengan banyak negara adalah untuk menjamin pasokan energi dalam jangka panjang. Bagi Jepang keterjaminan pasokan energi dan bahan baku akan menjadi kunci untuk mengembangkan dan menjaga daya saing industrinya. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat maju di sektor industri manufaktur karena keunggulan sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, tanpa jaminan energi dan bahan baku, daya saing jepang sebagai negara industri akan luntur dan digantikan oleh negara – negara industri baru yang memiliki bahan baku dan menguasai energi dan telah berhasil menyiapkan sumber daya manusia dan teknologi.

Untuk mendukung strategi industrinya Jepang sangat agresif melakukan pendekatan dan negosiasi untuk penyusunan perjanjian EPA sejak tahun 2000-an. Untuk mendapatkan komoditas pendukung industrinya, Jepang sebagai negara industri maju memiliki daya tawar tinggi bagi negara mitra. Dengan pengalaman, modal dan teknologi yang menjadi keunggulannya, Jepang menawarkan dukungan pengembangan industri manufaktur di negara – negara mitra. Tawaran ini sebagai imbalan dari kesediaan negara mitra untuk menyediakan bahan baku dan bahan mentah. Sebagai contoh, dalam kerjasama dengan Malaysia, Indonesia dan

Thailand, draft perjanjian EPA tersebut menyebut tentang kerjasama dalam peningkatan daya saing industri otomotif, komponen otomotif, logam dan baja. Didalam kesepakatan bersama dengan Indonesia, antara lain *basic study*, pelatihan, pengiriman tenaga ahli, seminar dan lokakarya.

Kegiatan tersebut tentu bukanlah sesuatu yang baru dalam kerjasama Indonesia – Jepang. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Jika ditelaah lebih jauh sejak 1980 Jepang sangat agresif memberikan *Official Development Assistance* (ODA atau bantuan pembangunan resmi) kepada negara – negara yang akan dijadikan tujuan utama investasi. Dengan strategi ODA, Jepang akan mendapatkan manfaat langsung yakni menekan biaya investasi perusahaan – perusahaan Jepang di negara penerima ODA. Alasannya, dana ODA telah mengarahkan pembangunan fasilitas infrastruktur untuk mendukung bisnis perusahaan – perusahaan Jepang yang akan masuk ke negara penerima ODA. Namun, di era 2000-an, strategi perdagangan dan investasi internasional Jepang telah bergeser dan lebih menekankan pada strategi kerjasama FTA atau EPA, bukan lagi mengandalkan ODA.

Dengan strategi yang matang, dukungan pengembangan bagi industri negara – negara mitra pada akhirnya juga akan menguntungkan Jepang. Saran untuk mengembangkan industri di negara – negara mitra, pada dasarnya juga bertujuan untuk mendorong negara – negara mitra menjadi pemasok dan penyedia pasar yang efisien bagi bisnis dan industri Jepang. Karena kemampuan teknologi dan kepemilikan sumber daya yang relatif sama, negara – negara mitra Jepang

tersebut harus bersaing satu sama lain, sementara Jepang bisa mendapat manfaat yang optimal dari persaingan diantara para pemasok tersebut (http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf).

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, IJEPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi, namun juga sektor lainnya, antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainya yang tercakup dalam tiga pilar, yaitu:

1. Fasilitasi perdagangan dan investasi
   - Upaya bersama untuk memperbaiki investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang
   - Kerjasama dibidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa – jasa perdagangan.
2. Liberalisasi yaitu menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)
3. Kerjasama yaitu kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

Adapun manfaat investasi dari EPA adalah :

1. Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah ke sektor otomotif (suku cadang, elektrik atau elektronik) dan sektor kimia serta peralatan kantor;
   - Memperdalam struktur industri dengan investasi industri pendukung dimana suplier Indonesia dapat juga berkembang

dengan fasilitasi dari *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC);

- Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan dan kehutanan, dimana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerjasama;
- Investasi di bidang energi, termasuk bio-fuel yang juga akan di fasilitasi melalui proyek kerjasama

2. Di bidang jasa, aliran terbesar adalah ke sektor keuangan dan asuransi, perdagangan, transportasi dan *real estate*
3. EPA akan meningkatkan iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui perbaikan atau kepastian hukum bagi investor
4. Hasil EPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan pemerintah RI diharapkan akan akan menjadi kerangka hukum baru dan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti (Undang – undang Penanaman Modal, Revisi UU Pajak dan Bea Cukai)
5. Keuntungan EPA diharapkan akan memberikan daya tarik bagi investor asing berinvestasi di Indonesia (http://www.Indonesian embassy.jp/perdagangan/ manfaat_epa.pdf).

3.2.4 *Free Trade Agreement* (FTA)

sejak kegagalan pertemuan *World Trade Organization* (WTO) di Seattle tahun 1999, telah terjadi pergeseran arah negosiasi kerjasama perdagangan dari

multilateral ke regional dan bilateral dalam kerangka FTA. Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk melakukan FTA adalah kekhawatiran kehilangan pangsa pasar yaitu kemungkinan beralihnya mitra dagang ke negara lain yang telah melakukan FTA dengan mitra dagang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena anggapan bahwa daya tarik suatu negara akan meningkat dengan menjadi anggota suatu FTA yang akan mendorong antara lain terjadinya *trade creation* atau bisa disebut dengan *Free Trade Area* (Arifin, Ediana, Joseph, 2007:209).

Dalam perundingan FTA dengan negara mitra dagang, kepentingan domestik merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas perhatian, sehingga dalam proses pembentukan FTA harus diperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung yang akan dialami dengan memperhatikan antara lain daya saing perusahaan didalam negeri, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan pemerintah dari bea masuk impor meskipun nilainya tidak terlalu signifikan. FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain:

1. *Trade creation* adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA.
2. *Trade Diversion* terjadi akibat adanya insentif penurunan tarif, misalkan Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena menjadi lebih murah dan berhenti mengimpor gula dari China.

> Manfaat *trade creation* jauh lebih besar dibandingkan *trade diversion*. Selain itu juga terjadi pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi akibat terbentuknya spesialisasi diantara para pelaku industri dan perdagangan yang terpacu oleh adanya insentif liberalisasi tarif dan non-tarif. Dalam kerangka FTA, posisi tawar ekonomi regional menjadi lebih kuat dalam menarik mitra dagang dan investor asing maupun domestik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduk negara anggota (http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=370&detail=true).

Sebagaimana FTA lainnya, IJEPA merupakan bentuk kerjasama yang mencakup isu tradisional FTA yakni liberalisasi barang dan jasa maupun isu tambahan penting yang tidak dibahas dalam WTO atau disebut WTO *Plus*. Isu liberalisasi barang dan jasa akan di implementasikan dalam bentuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif.

3.2.5 *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA)

Badan Kerjasama Internasional Jepang atau yang lebih sering dikenal sebagai JICA adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Lembaga ini berada di bawah kekuasan Departemen Luar Negeri dan didirikan pada Agustus 1974. Program JICA diantaranya adalah akan memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, kebijakan dan perbaikan kelembagaan, dan penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi,

sehingga mengejar pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang adil, JICA juga menawarkan dukungan bertujuan untuk meningkatkan sistem dasar yang diperlukan oleh negara, serta sistem untuk secara efektif menyediakan layanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan membina lembaga-lembaga dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem-sistem tepat.

Sebagai sebuah organisasi khusus dalam kerjasama internasional, JICA akan melakukan pekerjaan yang kompetitif secara internasional, menempatkan pengalaman dan kebijaksanaan yang diperoleh di lapangan untuk bekerja dan menggunakan keahlian dan kemampuan berbagi pengetahuan dengan cepat dan akurat menangani berbagai isu pembangunan (http://www.jica.go.jp/english/).

3.2.6 Kerjasama Indonesia – Jepang Dalam Sektor Perikanan

Selama Orde Lama, bantuan dan investasi Jepang tidak terlalu besar, dibandingkan dengan beberapa negara lain khususnya Rusia dan eropa timur. Namun demikian, Jepang mendapat tempat terbaik sejak awal kepemimpinan Orde Baru di tahun 1966. Bahkan, untuk menarik minat investasi Jepang, tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga lobi-lobi informal. Sebagai hasilnya, aliran dana ODA dan investasi Jepang mengalir ke tanah air dan terus menguat, bahkan kemudian menjadi cukup dominan dalam perekonomian Orde Baru. Jepang sampai sekarang masih berada di kelompok teratas negara-negara yang menginvestasikan modalnya di Indonesia dan juga menjadi *partner* dagang utama Indonesia.

Pertambangan dan migas, kehutanan, dan perikanan merupakan beberapa sektor yang dikembangkan dalam kerangka kerjasama pemanfaatan sumberdaya alam. Khusus untuk perikanan, di awal rejim Orde Baru total investasi asing dalam sektor ini mencapai angka US$ 11,5 juta dari total komitmen investasi sekitar US$ 324 juta di bulan Oktober 1968. Jepang merupakan investor terbesar perikanan tersebut dengan dua komoditi utama sebagai sasaran yaitu udang dan tuna. Pada tahun 1968 investasi Jepang dipusatkan pada industri penangkapan udang dan ikan khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Perusahaan-perusahan Jepang ini tentu saja mampu mengeksploitasi sumberdaya ikan dengan hasil lebih baik, khususnya untuk komoditi udang yang menjadi komoditi ekspor utama, karena kemampuan teknologi yang dimilikinya. Sebagai hasilnya, ekspor ikan Indonesia meningkat fantastis dengan nilai hanya dari US$ 229 ribu pada tahun 1962, menjadi US$ 17,5 juta pada tahun 1971 (84% ekspor ke Jepang), dan US$ 211,1 juta tahun 1980 dengan pangsa ekspor Jepang mencapai 77.6% dari total nilai. Tuna adalah komoditi kedua setelah udang yang menjadi andalan Indonesia dan menjadi salah satu sumberdaya yang diminati Jepang. Berdasarkan data online yang dilaporkan oleh JBIC diketahui sejak tahun 1972 dana ODA sekitar 19.116 juta pada sub-sektor perikanan secara umum dialokasikan untuk pengembangan industri perikanan tuna seperti melalui *Tuna Fishery Development Project* di Sabang dan Benoa pada era 1970an, kemudian *Enginering Services and Jakarta Fishing Port Development* di pertengahan 1980an, 1990an dan 2004, dan *Enginering Services for Bitung Fishing Port Development Project* di pertengahan tahun 1990an. Karena itu, dari total ekspor tuna Indonesia selama tiga dekade

terakhir, lebih dari 70% ditujukan untuk pasar Jepang khususnya untuk komoditas ikan tuna segar dan ikan tuna yang melalui proses pendinginan atau pembekuan (http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=279:refleksi-50-tahun-hubungan-ekonomi-indonesia-jepang-dalam-sektor-perikanan).

Dari sisi ekonomi, periode antara 1970an sampai menjelang pertengahan 1990an dapat dikatakan periode emas hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dalam bidang perikanan. Ekspor perikanan Indonesia terutama udang mencapai puncaknya dalam periode ini. Berkembang pesatnya budidaya udang windu yang juga disokong oleh dana hutang luar negeri di awal tahun 1980an menjadikan Indonesia sebagai eksportir utama untuk udang, paling tidak sampai pertengahan 1990an. Sayangnya, berbagai kegagalan budidaya udang karena imbas praktek budidaya yang tidak sehat seperti penyakit dan penurunan kualitas serta kerusakan lingkungan membuat tampilan industri udang nasional terpuruk. Posisi Indonesia pun kemudian ditempati oleh Thailand yang menjadi produsen dan pemasok udang dunia terbesar saat ini. Perkembangan yang tidak meyakinkan selama dekade 1990an menyebabkan posisi Indonesia juga terlewati oleh Vietnam yang kini bahkan menjadi suplier utama kebutuhan udang Jepang. Karena itu, era baru dengan kesepakatan baru melalui IJEPA perlu mempertimbang-kan faktor-faktor non-ekonomi tersebut (http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=comk2 &view=item&id=279:refleksi-50-tahun-hubungan-ekonomi-indonesia-jepang-dalam-sektor-perikanan).

Kerjasama pengembangan perikanan yang lebih berkelanjutan dapat menjadi tema besar sektor perikanan ke depan. Tema ini tentu saja akan tepat

dengan peran yang tengah disandang Jepang sebagai *leader* gerakan lingkungan hidup global saat ini (http://io.ppijepang.org/v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=279:refleksi-50-tahun-hubungan-ekonomi-indonesia-jepang-dalam-sektor-perikanan).

3.3 *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)

Gagasan awal kerjasama ekonomi yang kemudian dikenal dengan IJEPA itu pertama kali muncul ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi pada bulan Juni 2003.

Hasil pertemuan tingkat kepala negara itu kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya *joint study* oleh kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2003, Jepang dan Indonesia sepakat menggali lebih dalam kemungkinan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk *Joint Study Group* yang membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral tersebut. Pada awal tahun 2005, *Joint Study* Group ini mengadakan tiga kali rapat untuk memutuskan layak tidaknya dilaksanakan FTA antara kedua Negara serta memutuskan kapan dimulainya proses negosiasi. Pada tanggal 2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke Tokyo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi FTA dengan kerangka IJEPA. Berbagai perundingan dan *intersesion meeting* kemudian dilaksanakan antara bulan Juli 2005 sampai dengan Juni 2007.

Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia (http://www.kemenperin.go.id/IND/Publikasi/Ijepa/struktur.pdf).

Dalam rangka implementasi IJEPA masing-masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang pada ak hirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk dimulai (*entry to force*) pada tanggal 1 Juli 2008 (http:// www. kemenperin. go.id/IND/ Publikasi /Ijepa/ struktur.pdf).

Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan IJEPA dalam rangka mewujudkan kerjasama ekonomi secara komprehensif dilandasi oleh tiga pilar yaitu:

1. Fasilitasi perdagangan yaitu pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja kerja bea cukai, penanganan di pelabuhan dan jasa – jasa yang terkait dengan perdagangan.
2. Liberalisasi yaitu pengurangan atau penghapusan balasan dan hambatan lain perdagangan
3. Kerjasama yaitu fitur yang khusus berkaitan dengan IJEPA dimana kedua pihak menyetujui untuk bekerjasama di berbagai bidang di luar perdagangan dan dimana pihak Jepang berkomitmen melakukan kegiatan untuk membangun kapasitas dan sumber – sumber daya yang

penting bagi Indonesia (http://www.kemenperin.go.id/IND/Publikasi/Ijepa/struktur.pdf).

Bagi Indonesia sendiri kesepakatan IJEPA dengan Jepang merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral pertama, sedangkan bagi Jepang kesepakatan IJEPA bukanlah yang pertama kalinya. Sebab, sebelumnya Jepang sudah menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi dengan sejumlah negara seperti dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Meksiko.

IJEPA bukanlah pakta perdagangan bebas atau FTA biasa. Sebab, yang disepakati di dalam IJEPA tidak hanya meliputi perjanjian pembukaan akses pasar semata seperti terjadi pada kesepakatan perdagangan bebas lainnya, tetapi merupakan kerjasama ekonomi yang sangat komprehensif antara Indonesia dan Jepang (Media Industri, 2007:6).

3.3.1 Sebelas Bidang Perundingan Dalam Kerangka Kerjasama IJEPA

IJEPA merupakan kerjasama yang komprehensif dan lebih memberikan peluang daripada kesepakatan dalam WTO, sehingga sering disebut dengan WTO *plus*. Untuk mengakomodasi dan memperlancar jalannya perundingan, maka IJEPA mengelompokkan perundingan ke dalam 11 bidang, yaitu:

1. *Trade in goods: tariffs and non-tariff measures, rules of origin trade remedies* (Perdagangan dalam barang : ketentuan tarif, non-tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian *dispute* mengenai mutu barang). Dengan menyadari keinginan liberalisasi perdagangan antara kedua negara, kedua pihak akan meniadakan atau mengurangi tarif secara

menyeluruh, kesepakatan oleh kedua pihak meliputi sektor – sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri, yang akan memberi dukungan pada perluasan perdagangan dan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara kedua negara.

2. *Trade in services* (Perdagangan dalam jasa). Kedua pihak akan membuat komitmen dalam berbagai sektor yang mencakup profesional atau bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, keuangan, jasa kesehatan dan sosial, pariwisata dan jasa perjalanan, serta jasa transportasi.
3. *Customs procedure* (Prosedur bea cukai). Kedua pihak akan memperkenalkan pertukaran informasi dan kerjasama yang bermaksud untuk fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi guna memastikan efektifitasnya.
4. *Investment* (Penanaman modal). IJEPA akan menyajikan suatu kerangka kerja bagi perluasana dan fasilitasi investasi lintas – batas antara kedua negara melalui kesepakatan – kesepakatan mengenai perlakuan nasional, perlakuan *most favored national* (MFN) dengan pelarangan adanya syarat performa, penyelesaian *disputed* antara negara dan investor, dan perlindungan yang lebih maju pada para investor dan investasi.
5. *Movement of natural persons* (Fasilitasi bergeraknya sumber daya manusia). Kedua pihak akan menyajikan suatu kerangka kerja bagi fasilitasi bergeraknya orang – orang dalam berbagai kategori

termasuk kunjungan jangka pendek, perpindahan intra perusahaan, dan kunjungan orang – orang biasa terlibat dalam jasa – jasa profesional. Dalam konteks yang sama, kedua pihak akan pula mengembangkan suatu skema penerimaan perawat dan pekerja pelayanan. Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang sama, yakni bergeraknya orang – orang biasa yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus didorong. Berdasarkan konsultasi bilateral masa lalu, Indonesia menegaskan kembali untuk memfasilitasi dan mempermudah prosedur bagi kegiatan bisnis Jepang di Indonesia, sesuai dengan hukum dan regulasi Indonesia yang relevan.

6. *Energy and mineral resources* (Sumber daya energi dan mineral). Signifikansi sumber daya energi dan mineral bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di kawasan. Kedua pihak akan memastikan koordinasi untuk memperkenalkan dan memfasilitasi investasi dalam sektor ini, kedua pihak akan mempererat suatu kebijakan dialog dan kerjasama.
7. *Intelectual property right* (Hak cipta). Kedua pihak akan memastikan perlindungan efektif atas hak cipta, mempromosikan efisiensi dan transparansi dalam sistem administrasi perlindungan hak cipta, pemalsuan dan pembajakan. IJEPA akan menyediakan dasar bagi kedua pihak untuk kerjasama dalam bidang – bidang rincian hak cipta yang saling menguntungkan.

8. *Government procurement* (Prosedur pembelian oleh pemerintah). IJEPA akan menyusun suatu kerangka bagi pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua pemerintah, sektor swasta dan organisasi – organisasi relevan lainnya.
9. *Competition* (Persaingan). Kedua pihak akan mempromosikan persaingan dengan menangani kegiatan – kegiatan anti-persaingan dan bekerjasama dalam memperkuat kebijakan persaingan serta implementasi hukum persaingan, sesuai dengan hukum dan peraturan masing – masing.
10. *Improvement of business environment and promotion of business confidence* (Perbaikan dalam lingkungan bisnis dan promosi kepercayaan bisnis). IJEPA akan menyediakan suatu mekanisme bagi perbaikan lingkungan dan promosi kepercayaan bisnis, dengan partisipasi kedua pemerintahan, sektor – sektor swasta yang bersangkutan dan organisasi – organisasi yang relevan.
11. *Cooperation* (Kerjasama). kedua pihak akan mempromosikan kerjasama bilateral bagi pengembangan kapasitas dalam berbagai bidang, seperti industri dan manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, promosi perdagangan dan industri pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pembelian oleh pemerintah, lingkungan hidup, dengan maksud meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua pihak. Kedua pihak dapat juga mempertimbangkan kerjasama dalam bidang –

bidang lain yang disetujui bersama di waktu yang akan datang (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611-2.html).